

NILAI-NILAI ISLAMI DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT MUSLIM

Yanwar Pribadi

IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten

Abstrak

Makalah ini menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di negara-negara Muslim, dengan fokus Indonesia dan kemuduran pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim. Kondisi utama kemiskinan adalah di mana tidak ada negara Muslim modern yang melandaskan kebijakan pembangunannya pada ideologi Islam. Kesalahan mereka ini yang terpenting yaitu adalah bahwa mereka mencampuradukkan teori dan ideologi Islam dengan praktik dan perilaku negara-negara Muslim. Teori dan ideologi akan mengantarkan kepada kekuatan untuk mentransformasikan masyarakat ke dalam segala aspeknya. Bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan budaya. Pada abad ke-19 misalnya, atau bahkan jauh sebelumnya, teori dan praktik pembangunan model Barat merupakan hal yang biasa di negara-negara Muslim dan hanya sedikit yang menyadari watak teori dan praktik semacam itu cenderung mewarnai budaya Muslim. Solusi yang ditawarkan adalah bahwa proses pembangunan pada negara Islam harus diarahkan menuju sasaran induk yang tentu berbeda dengan sasaran pembangunan yang tidak Islami. Dalam pandangannya tentang manusia yang menyeluruh, maka upaya pembangunan yang Islami bertujuan menyeimbangkan antara keperluan material dan rasional dengan keperluan rohani dan mental. Bahkan dalam masalah yang paling sederhana pun, Islam selalu menganjurkan pada sikap yang menengah dan tidak ekstrim. Sebagaimana diingatkan bahwa yang tradisional tidak selalu menghambat pembangunan. Islam memandang secara bebas terhadap keinginan manusia akan lingkungan material-seperti kecintaannya pada kemakmuran dan hak milik. Yang ingin dilakukan Islam, bukan melarang tindakan tersebut, namun memberikan perspektif yang lebih tepat, sehingga kehidupannya tidak menjadi budak manusia atau sasaran puncak kehidupannya. Hal ini akan sangat relevan jika dikaitkan dengan rencana pemerintah merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.

Kata kunci: Islam, Pembangunan, Ekonomi, Indonesia, Pengembangan masyarakat

Pendahuluan

Sudah menjadi rahasia umum jika kondisi mayoritas masyarakat Muslim rendah dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Data yang pasti tentang GNP atau penghasilan perkapita orang-orang yang beragama Islam tidak kita miliki, ataupun jika ada, maka ia sering tidak akurat. Fakta di lapangan menunjukkan jumlah orang miskin dan pengangguran semakin bertambah.

Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana Islam memegang peranan dalam mengembangkan masyarakat Muslim jika ia dipahami dan nilai-nilainya diimplementasikan secara tepat sebagai salah satu aspek pembangunan, bukan hanya sebagai dogma agama. Islam dalam hal tersebut berperan sebagai fasilitator pembangunan yang memberdayakan masyarakat pendukungnya.

Kondisi global dan permasalahan yang ada

Kemungkinan besar, tanpa adanya kehendak dan kekuatan politik, tidak ada satu pun sistem ekonomi dunia yang tepat yang dapat diwujudkan. Kapitalisme dan sosialisme tanpa sistem politik yang menopang, mungkin saja tidak akan tegak berdiri di Amerika Serikat dan negara Islam lainnya, atau di Uni Sovyet dan negara blok Timur lainnya (sebelum mereka runtuh). Kenyataan historis akan berbicara mengapa sangat sedikit pembahasan pembangunan ekonomi dilakukan di luar negara kapitalis atau sosialis. Inilah yang kemudian disebut sebagai alternatif pembangunan yang biasanya berlangsung di dunia ketiga.

Ahmad Haffar yang melakukan analisis terinci tentang perspektif Barat mengenai pembangunan ekonomi di dalam Islam, berkesimpulan bahwa dengan mengecualikan dua atau tiga sarjana, dapat dikatakan bahwa hampir semua sarjana Barat memandang Islam sebagai penghambat pembangunan ekonomi. Misalnya saja ia mengutip S.D. Goitein yang pendapatnya banyak beredar, menyatakan bahwa kemunduran dunia Muslim terjadi karena pandangan yang merendahkan

kehidupan sekuler, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara. Tetapi pendapat ini pula ditolak oleh sarjana Prancis non-Muslim. Banyak sarjana Barat lainnya berpandangan bahwa alasan mengapa Muslim lemah dalam perdagangan dunia dan pembangunan ekonomi, terutama disebabkan oleh “fatalisme dan mistisme Islam yang meredam inisiatif pribadi, berusaha dan mengambil resiko, dan penghambat bagi pembangunan ekonomi”. Perumpamaan lain tentang Islam di Barat menurut Bernard Lewis juga menyangkut masalah nilai. Misalnya saja kesetiaan terhadap keluarga—dalam istilah modern mereka samakan dengan nepotisme; dan kesetiaan terhadap kebaikan agama, mereka namakan fanatisme.

Menurut Bernard Lewis lagi, banyak nilai-nilai luhur dalam agama dinilai menghambat pembangunan. Misalnya saja kesederhanaan, yang lebih cenderung menekan dorongan nafsu ketimbang memuaskannya, dianggap mengurangi dan membatasi keinginan manusia ketimbang memuaskannya, sehingga cenderung meredam ikhtiar. Selain itu, keluhuran dan membuang kebiasaan seperti ini akan mudah menjerumuskan kepada kemalasan. Demikian pula tentang kebajikan dan kemurahan—yang dalam hal ini adalah zakat—yang merupakan kebajikan dalam ajaran Islam tetapi sering dicela, karena apabila kebiasaan ini telah diterima, berarti menerima kehadiran pengemis di dalam masyarakat. Yang selanjutnya akan memojokkan keluhuran membanting tulang. Sehingga untuk menyatakan bahwa Islam mendorong pembangunan ekonomi memang amat sulit.

Yang lebih penting, dalam kenyataannya banyak sarjana Barat yang tidak dapat menemukan negara Muslim modern yang melandaskan kebijakan pembangunan ekonominya pada ideologi Islam. Kesalahan mereka ini yang terpenting yaitu adalah bahwa mereka mencampuradukkan teori dan ideologi Islam dengan praktik dan perilaku negara-negara Muslim. Yang pertama (teori dan ideologi) memang akan mengantarkan kepada kekuatan untuk mentransformasikan masyarakat ke dalam segala aspeknya. Bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan budaya. Sedang yang terakhir, lebih banyak menggambarkan gejala

ketergantungan total. Pada abad ke-19, atau bahkan jauh sebelumnya, teori dan praktik pembangunan model Barat merupakan hal yang biasa di negara-negara Muslim dan hanya sedikit yang menyadari watak teori dan praktik semacam itu cenderung mewarnai budaya Muslim.

Semua negara Muslim masuk dalam kategori negara-negara berkembang, meskipun di antaranya relatif kaya, sementara yang lainnya sangat miskin. Mayoritas negeri-negeri ini, terutama yang miskin, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sulit. Salah satu masalahnya adalah ketidakseimbangan ekonomi makro yang dicerminkan dalam angka pengangguran dan inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran yang sangat besar, depresi nilai tukar mata uang yang berkelanjutan, dan beban utang yang berat. Problem lainnya adalah kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang sangat lebar di antara golongan-golongan yang berbeda-beda dari setiap negara dan juga antarnegara Muslim. Konsekuensinya, kebutuhan pokok bagi setiap penduduknya tetap belum dapat dipenuhi, sementara golongan menengah dan kaya hidup dalam kemewahan. Hal ini cenderung merusak jaringan solidaritas sosial dan merupakan salah satu penyebab utama ketidakstabilan sosiopolitik.

Solusi?

Melihat skenario ini, maka apa yang harus dilakukan oleh negara-negara Muslim bukan hanya bagaimana mendapatkan laju pertumbuhan yang tinggi dalam output agregat. Mereka harus mengurangi secara substansial ketidakseimbangan ekonomi makro dan kesenjangan ekonomi. Tanpa reduksi dalam ketidakseimbangan dan kesenjangan ini, maka pertumbuhan output yang terus berlanjut dan kesehatan sosio-politik dan stabilitas di negara-negara ini, pada gilirannya akan terombang-ambing. Negara-negara Muslim seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, karena itu, harus memiliki suatu strategi

pembangunan yang akan membantu mereka mempercepat pertumbuhan dengan keadilan dan mengurangi ketidakstabilan.

Masalahnya, sebenarnya bukan terletak pada: Apakah Islam mendorong atau bahkan menentang pembangunan ekonomi, karena di dalam al-Quran dan as-Sunnah sendiri tidak ada satu pun perintah agar kita menjadi mandeg (fatalisme). Pertanyaannya, justru, jenis pembangunan seperti apakah yang sesuai dengan ajaran Islam? Bagaimanakah orientasi ideologinya? Bagaimanakah metode dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut?

Sebagai jawabannya, Islam memang tidak sejalan dengan sistem pembangunan, baik yang berorientasi pada kapitalisme ataupun sosialisme, di samping itu juga Islam menawarkan pemecahan ketiga. Dalam kenyataannya, Islam telah memperingatkan bahaya mengikuti salah satu mazhab (pembangunan) yang ada—kendati dalam variasinya—karena keduanya menunjukkan sifatnya yang materialistis. Mazhab kapitalis mencoba memisahkan masalah moral dan etika dari bidang ekonomi, sedang mazhab sosialis memandang masalah ekonomi sebagai bagian dari konsep materialisme sejarah. Secara mendasar Islam berbeda dari kedua mazhab tersebut karena Islam sangat menghargai kesatuan pengalaman manusia.

Salah satu pernyataan yang andal tentang pandangan Islam mengenai nasionalisme, sosialisme, dan kapitalisme adalah bahwa Islam tidak dapat dipadukan dengan nasionalisme, sosialisme, ataupun kapitalisme. Pendapat para sarjana yang menentang doktrin Qaddafi tersebut menggambarkan bahwa pemikiran para Islamis, dan beberapa di antaranya akan dikutip berikut ini (M.A. Al-Buraey, 1986)

1. Sosialisme adalah istilah yang digunakan dalam filsafat materialisme dan sesungguhnya tidak sesuai dengan Islam, sama seperti halnya filsafat kapitalisme.

2. Islam sangat menentang kapitalisme dan sosialisme, yang keduanya dianggap sama.
3. Filsafat sosialis semata-mata dengan suku-isme dengan ciri bersama kelas sosial-ekonomi, dan anggapan dasar mereka bahwa manusia bertindak karena dorongan kepentingan kelas. Sebaliknya Islam menciptakan tatanan sosial dan ekonomi, di mana di dalamnya tidak ada kelas masyarakat yang memiliki ciri atas dasar ekonomi.
4. Filsafat sosialis tegak atas dasar pertentangan kelas yang berkepanjangan, di mana setiap kelas selalu melawan pemegang posisi yang dominan. Secara tersirat, sosialis memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat jelek, mementingkan diri sendiri, dan penuh tipu daya. Bias filsafat dari sosialisme ini berasal dari pengaruh Yahudi dan Nasrani, yang mana akar Marxisme memang terpancar di sana. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam.
5. Secara historis, sosialisme sebenarnya merupakan reaksi terhadap kekerasan sistem kapitalisme, di mana Islam merupakan kekuatan positif yang lebih dahulu mendorong kapitalisme.
6. Baik kapitalisme ataupun sosialisme, keduanya didukung oleh organisasi diktator negara yang merupakan kekuasaan pemaksa, baik yang dipimpin oleh golongan borjuis ataupun oleh kaum proletar. Dalam praktiknya, sosialisme hanya mengarahkan gerakan menuju pada kapitalisme negara.
7. Sebenarnya tidak ada perbedaan kualitatif antara kapitalisme swasta di bawah negara borjuis, atau kapitalisme negara di bawah negara sosialis. Kedua sistem tersebut bersifat kooperatif.
8. Sebaliknya, Islam memotivasi tindak sosial dan ekonomi pada manusia dalam suatu cara, sehingga tidak muncul ketamakan dan kerakusan seperti pada sistem kapitalis; Islam mendorong kebaikan bersama dalam

kerangka kebersamaan, yang mana tujuan-tujuan pribadi dicapai tanpa harus menyebabkan biaya sosial. Islam mempersatukan tatanan sosial dalam persaudaraan manusia, yang memberikan jaminan melebihi sistem negara kesejahteraan ataupun negara sosialis di mana pun, di mana kaum lemah di dalamnya akan sangat dilindungi.

Banyak kepustakaan mutakhir, baik yang ada di dunia Muslim maupun Barat, isinya mengkritik baik kapitalisme maupun sosialisme atas kegagalan mereka berdua menyelesaikan masalah pembangunan ekonomi di dunia ketiga.

Dewasa ini, negara-negara dunia ketiga ataupun dunia Muslim khususnya sudah mulai sadar bahwa keterbelakangan bukanlah syarat mutlak untuk menahap perkembangan ekonomi, dan cara yang terbijaksana untuk mengatasinya yaitu tidak mengulangi pengalaman malang yang diderita Barat, dan sebaliknya kemudian mencari cara untuk melaksanakan pembangunan yang lain jenisnya. Dunia ketiga harus memilih pembangunan sejati, yang akan dapat menyelamatkan harga diri rakyatnya sendiri, serta sekaligus mengakhiri dominasi imperialisme modern.

Kondisi di Indonesia

Rencana perekonomian yang dibangun oleh tim ekonomi pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan dinilai banyak pengamat sering gagal. Kenyataan menunjukkan bahwa rencana-rencana tersebut sebagian besar hanya masuk “gudang ide” tanpa pernah bisa didistribusikan dengan baik. Tim ekonomi yang dibentuk lebih banyak bermain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nuansa politis sangat kental mewarnai perencanaan kebijakan yang dibuat oleh tim ekonomi, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Bahkan penentuan tim ekonomi itu sendiri dicap oleh banyak pihak sebagai suatu “perang tarik ulur

kepentingan”, sehingga yang akhirnya dihasilkan adalah suatu keadaan di mana perencanaan kebijakan itu tidak dapat menemui sasarannya.

Sementara itu perekonomian perencanaan pusat yang telah mengklaim dapat menjamin sasaran-sasaran material, bukan saja telah gagal klaimnya, melainkan juga telah mengalami krisis ekonomi serius, yang tidak diragukan lagi meniscayakan kegagalan sistem tersebut. Oleh karena itu perlu dicari sebuah cara yang tepat dan formula yang mujarab untuk jangka waktu yang panjang demi terciptanya sebuah tatanan perekonomian negara yang stabil dan mampu menjawab tantangan ekonomi global. Pemerintah perlu berpikir tentang perlunya perencanaan kebijakan strategis untuk jangka panjang yang diharapkan tidak salah sasaran.

Salah satu contoh dari program ekonomi pemerintah adalah Program Benteng sebagai bagian terpenting dari Rencana Urgensi Perekonomian yang pernah dijalankan pada masa pemerintahan Sukarno. Program tersebut dinilai banyak pengamat gagal total. Program ini yang bermaksud membina suatu kelas pengusaha pribumi untuk dapat bersaing dengan pengusaha asing dan Tionghoa, akhirnya justru malah memanjakan pengusaha asing itu sendiri, khususnya pengusaha Tionghoa.

Ada dua sebab utama kegagalan ini. Pertama, karena faktor patrimonial masyarakat sehingga pemerintah tidak selektif dalam memberikan kredit dan hak-hak istimewa pada golongan pribumi di mana hampir seluruh pengusaha pribumi yang mendapat keistimewaan adalah yang mempunyai hubungan tertentu dengan pejabat. Hal ini mengakibatkan penyalahgunaan wewenang sehingga membuat birokrasi yang korup dan tidak bertanggung jawab. Kedua, kegagalan tersebut diperhebat dengan tumbuhnya pengusaha “Ali-Baba”. Dalam jaringan kegiatan ekonomi itu, pengusaha pribumi yang telah mendapatkan hak dan kredit dari pemerintah berusaha menjualnya kepada orang Tionghoa. Orang pribumi hanya

menjadikan dirinya “tameng”, sedangkan yang menjalankan usaha ekonominya adalah orang-orang Tionghoa.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi seluruh masyarakat, tidak hanya sebagai perseorangan, tetapi lebih penting lagi sebagai sumber daya sosial: himpunan, kelompok, lembaga, dan pranata sosial yang dapat meningkatkan potensi masyarakat. Dari sana nampak bahwa aspek-aspek tersebut secara simultan belum dimiliki secara mantap oleh masyarakat dunia ketiga, termasuk Indonesia, yang sedang membangun. Hal demikian terjadi karena mereka tinggal membeli atau mentransfer begitu saja teknologi dari negara-negara maju. Mereka pada umumnya belum meresapi dan menikmati proses panjang yang harus dilalui bersama dalam melakukan penelitian untuk menemukan dan menciptakan teknologi serta bagaimana pula mereka harus belajar menerima umpan balik yang kritis dari masyarakat pengguna jasa teknologi tersebut. Kita dapat melihat bahwa negara-negara Islam sekarang mengalami keterbelakangan ekonomi secara menyeluruh yang dalam hal ini ditandai oleh kenyataan tidak atau kurang dapat dimanfaatkannya sumber-sumber manusia maupun alamnya sehingga mengakibatkan merajalelanya kemiskinan, kemandegan, dan kemunduran.

Solusi Islam untuk kondisi di Indonesia?

Kenyataan yang berlawanan dalam dunia Islam itu adalah bahwa ia memiliki banyak sumber kekayaan, tetapi secara ekonomi ia miskin dan lemah. Memang perencanaan pembangunan dilakukan di beberapa negara Muslim. Di beberapa negara, perencanaan ini bahkan sudah sampai pada tingkat yang agak maju. Nigeria, Mesir, Syria, Aljazair, Iran, Pakistan, dan Malaysia adalah beberapa negara yang bisa dijadikan contoh dalam hal ini. Namun demikian hampir di semua negara tersebut kegiatan pembangunannya dilakukan dengan mengikuti model dasar yang dikembangkan para pemikir dan praktisi di Barat yang “menjual” konsep mereka kepada para perencana pembangunan di negara-negara Muslim itu

melalui jalur diplomasi internasional, tekanan ekonomi, mobilisasi intelektual, dan beberapa cara lain yang terbuka maupun tertutup. Apapun sumber inspirasinya yang diambil, tidak ada satu pun usaha yang bisa disebut sebagai usaha yang mencerminkan pengkajian kembali gagasan-gagasan pembangunan ekonomi yang mendasar menurut ide-ide dan nilai-nilai Islam dan peranannya di dunia ini.

Proses pembangunan pada negara Islam harus diarahkan menuju sasaran induk yang tentu berbeda dengan sasaran pembangunan yang tidak Islami. Dalam pandangannya tentang manusia yang menyeluruh, maka upaya pembangunan yang Islami bertujuan menyeimbangkan antara keperluan material dan rasional dengan keperluan rohani dan mental. Bahkan dalam masalah yang paling sederhana pun, Islam selalu menganjurkan pada sikap yang menengah dan tidak ekstrim. Sebagaimana diingatkan bahwa yang tradisional tidak selalu menghambat pembangunan. Islam memandang secara bebas terhadap keinginan manusia akan lingkungan material-seperti kecintaannya pada kemakmuran dan hak milik. Yang ingin dilakukan Islam, bukan melarang tindakan tersebut, namun memberikan perspektif yang lebih tepat, sehingga kehidupannya tidak menjadi budak manusia atau sasaran puncak kehidupannya. Hal ini akan sangat relevan jika dikaitkan dengan rencana pemerintah merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.

Jadi tidak mungkin pemerintah merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi dalam kerangka keterbatasan sumber-sumber daya langka kecuali jika pemerintah menghimpun kebutuhan-kebutuhannya, sumber-sumber daya dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kedudukannya, di mana dan ke mana kita hendak pergi. Mungkin hal itu akan dapat dilakukan lebih efektif sekiranya pemerintah mempersiapkan suatu rencana kebijakan strategis jangka panjang. Perencanaan yang demikian akan memungkinkan negara mengambil langkah positif terhadap semua sumber-sumber daya fisik dan manusia serta membentuk sederetan prioritas-prioritas yang telah ditentukan dengan baik. Hal ini akan membantu memberikan arah yang jelas bagi kebijakan pemerintah dan program-program pengeluaran serta

memberikan inisiatif tindakan-tindakan efektif untuk digerakkan dalam perubahan institusional yang diperlukan, sehingga memungkinkan sektor pemerintah dan swasta memberikan kontribusinya secara penuh.

Rencana itu tidak perlu komprehensif. Rencana itu juga tidak perlu hanya bergantung pada pemerintah sebagai sumber utama investasi dan usaha karena hal itu tidak layak dan juga tidak perlu. Setiap gerakan ke arah ini akan membuat ekonomi menjadi kurang responsif terhadap keadaan-keadaan yang sedang berubah; akan menghambat usaha dan inisiatif individu; dan malah akan mengundang kontradiksi dan persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai, seperti yang dialami oleh negara-negara sosialis yang menggunakan perencanaan ini. Apa yang harus dilakukan oleh negara-negara Muslim adalah menjajal semua klaim pada sumber-sumber daya melalui mekanisme filter nilai-nilai Islam dan memotivasi atau mengaktifkan sektor swasta, melalui reformasi moral dan institusional serta intensif-intensif ekonomi, agar memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi dan pemerataan optimal.

Dengan demikian, artikulasi mekanisme filter Islam merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal itu akan membantu menentukan sasaran-sasaran ekonomi menurut prioritas yang ada dan menentukan cara-cara mencapainya. Pembentukan prioritas-prioritas dalam kerangka syariah akan membantu analisis alokasi sumber daya yang ada dan meletakkan secara tepat arah perubahan. Perlu juga ditekankan nilai-nilai Islam berkenaan dengan konsumsi, tabungan, investasi, dan etika kerja serta melengkapi program-program pendidikan untuk mendorong mereka.

Para pejabat pemerintah dan pegawai negeri perlu dimotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Memang keimanan kepada hari pertanggungjawaban di depan Tuhan sangat penting, tetapi tidak cukup memberikan motivasi kepada mereka agar berbuat lebih baik atau lebih efisien. Untuk tujuan ini perlu diaktualisasikan keadilan sosio-ekonomi. Para pekerja, pengusaha, investor, dan penabung harus memperoleh imbalan yang adil bagi

kontribusinya kepada output. Tentu saja harga dan upah harus ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi, dalam situasi sekarang, karena terdapat konsentrasi kekayaan dan kekuatan pada segelintir orang, hal itu merefleksikan karakter monopolistik dan monopsonik, karena itu “tidak adil”.

Keadaan demikian itulah yang telah menyebabkan hambatan kepada dorongan, inisiatif, kreativitas, dan usaha sebagian besar penduduk. Rencana itu juga harus mengindikasikan kebijakan dan reformasi institusional yang diperlukan untuk menghapuskan ketidakadilan yang berlaku.

Rencana itu juga harus menentukan perubahan-perubahan struktural yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan laju pertumbuhan, tanpa harus menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan eksternal. Rencana tersebut juga harus mengindikasikan lembaga-lembaga yang harus dibentuk atau direformasi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan secara substansial yang kini berlaku, dan menciptakan kepemilikan bisnis serta aset-aset yang mendatangkan penghasilan yang berbasis luas.

Reformasi perbankan menurut ajaran Islam menghendaki perhatian khusus dari para perencana karena besarnya kontribusi yang dapat diberikan pada aspek alokasi sumber-sumber daya secara efisien. Sebuah reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan juga perlu dilakukan agar para siswa menjadi seorang Muslim yang lebih baik dan lebih produktif. Singkatnya, rencana itu tidak harus berkonsentrasi pada suatu tindakan saja atau mengandalkan kontrol-kontrol yang tidak perlu; justru ia harus menggunakan sederet kebijakan dan insentif untuk merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi. Ia harus mencerminkan suatu perubahan falsafah dan strategi pembangunan. Semua kebijakan fiskal, moneter, pendapatan, impor, dan produksi harus diformulasikan dalam kerangka rencana kebijakan strategis ini.

Aspek produksi, impor, distribusi, dan konsumsi yang masuk dalam rencana kebijakan strategis ini harus dibiarkan bebas melalui sistem harga tanpa ada kontrol birokrasi. Kontrol-kontrol termasuk penggunaan kurs bagi transaksi berjalan boleh dipergunakan sepanjang hal itu memang tidak dapat dihindari. Sebuah kebijakan umum yang membiarkan reformasi sosial dan institusional serta insentif menggantikan kontrol-kontrol akan membantu menghapuskan ketidakmerataan dalam imbalan materi, mendorong orang untuk bekerja, dan bukan saja membantu mengurangi korupsi serta mencapai efisiensi yang lebih besar, tetapi juga akan menciptakan inovasi dan penyesuaian terhadap keadaan-keadaan yang tengah berubah lebih mudah.

Bagaimanapun juga, setiap hal yang tidak sesuai dengan rencana tidak boleh dibiarkan, dengan mengabaikan betapa kaya dan berkuasanya seseorang itu. Ada pertimbangan khusus yang harus diberikan, yaitu kemungkinan adanya efek buruk yang akan menimpa kaum dhuafa akibat tindakan kebijakan. Oleh sebab itu, harus dicari cara-cara menghilangkan kemungkinan ini.

Pada dasarnya tidak perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan dari satu sudut ke sudut yang lain, atau dari tahun ke tahun, karena perspektif sumber-sumber daya, kebutuhan-kebutuhan, dan sasaran-sasaran suatu negara tidak berubah begitu cepat. Seringnya terjadi perubahan dalam kebijakan hanya akan menyebabkan ketidakpastian dan hanya akan memperkaya mereka yang memiliki informasi dari dalam. Namun, kesalahan yang terjadi pada saat persiapan perencanaan harus diratifikasi dengan pikiran yang terbuka, tanpa harus ditunda-tunda. Karena kandungan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara Muslim itu berbeda-beda, maka rencana kebijakan strategis ini tidak selalu sesuai bagi semua, tetapi tujuan ekonomi akan selalu sama.

Barangkali tidak realistis mengharapkan pemerintah bersedia memformulasikan dan melaksanakan suatu rencana kebijakan strategis seperti ini, kecuali jika mereka mendapatkan inspirasi dari nilai-nilai syariah dan komitmen terhadap

kesejahteraan rakyat, bukan kepada sekelompok anggota masyarakat. Hal ini tidak mungkin kecuali jika mereka merupakan pemerintahan yang legitimated, yang telah menerima mandat dari rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka, baik karena keagalannya maupun keberhasilannya dalam memformulasikan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tepat. Karena itu, reformasi politik merupakan jantung utama semua reformasi di negara-negara Muslim. Tanpa reformasi demikian, jarak yang kini menjauhkan realitas kaum muslimin dengan ajaran-ajaran Islam tetap akan berlangsung. Tentu saja perlu langkah-langkah ke depan dan arah yang tepat, jika proses demokrasi seperti yang kini berlaku di seluruh dunia juga direformasi untuk mengurangi ketajaman biasanya dalam memberikan kekayaan dan kekuatan.

Kesimpulan

Kini nampak jelas bahwa permasalahan yang ada jauh lebih rumit dari yang kita dapat bayangkan. Solusi untuk mengembangkan masyarakat Muslim dunia dan juga Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemikiran belaka. Aksi nyata oleh pemerintah yang didukung oleh banyak pihak, termasuk warga masyarakat perlu segera direalisasikan. Yang jelas, solusi yang Islami sangat dibutuhkan bagi masyarakat Muslim yang sering berada dalam posisi marjinal di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buraey, Muhammad. 1985. *Islam Landasan alternatif Administrasi Pembangunan*. Penerjemah Achmad Nashir Budiman. Jakarta: CV rajawali
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Penerjemah Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hamid, M. Luthfi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan
- Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*. Ciputat: Logos
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1&2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Yafie, Ali dkk. 2003. *Fiqih Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju

